

Peraturan Menteri Perhubungan

1. **NO. PM 108 TAHUN 2017** Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek
2. **NO. PM 104 TAHUN 2017** Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI



OLEH:
Direktur Angkutan dan Multimoda
Ir.Cucu Mulyana,DESS

Jakarta, 15 Maret 2018
Rakornis Perhubungan Darat
Tahun 2018



kemenhub151 |

Email : info151@dephub.go.id |

dephub.go.id |



151

DIREKTUR ANGKUTAN DAN MULTIMODA

Nama : Ir. Cucu Mulyana, DESS
NIP : 19630909 199303 1 002
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
Tempat/Tanggal Lahir : Garut, 9 September 1963
Alamat : Jl Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta Pusat
No. Telp : (021) 3506127
Pendidikan : 1. S1 Teknik Sipil
Universitas Parahyangan, Bandung
2. S2 Pelabuhan Dan Pantai
Univertas Du Harve, Perancis
Jabatan : 1. Kasubdit Angkutan SDP
2. Direktur Keselamatan Transportasi Darat
3. Direktur Angkutan Dan Multimoda



1. MATERI MUATAN PM 108 TAHUN 2017.

MENGEDEPANKAN ASPEK



- a. Keselamatan dan keamanan;
- b. Kesetaraan, keberlangsungan usaha, perlindungan konsumen, dan kepentingan nasional;
- c. Kebutuhan masyarakat;
- d. Menjaga situasi dan kondisi dalam keadaan kondusif.

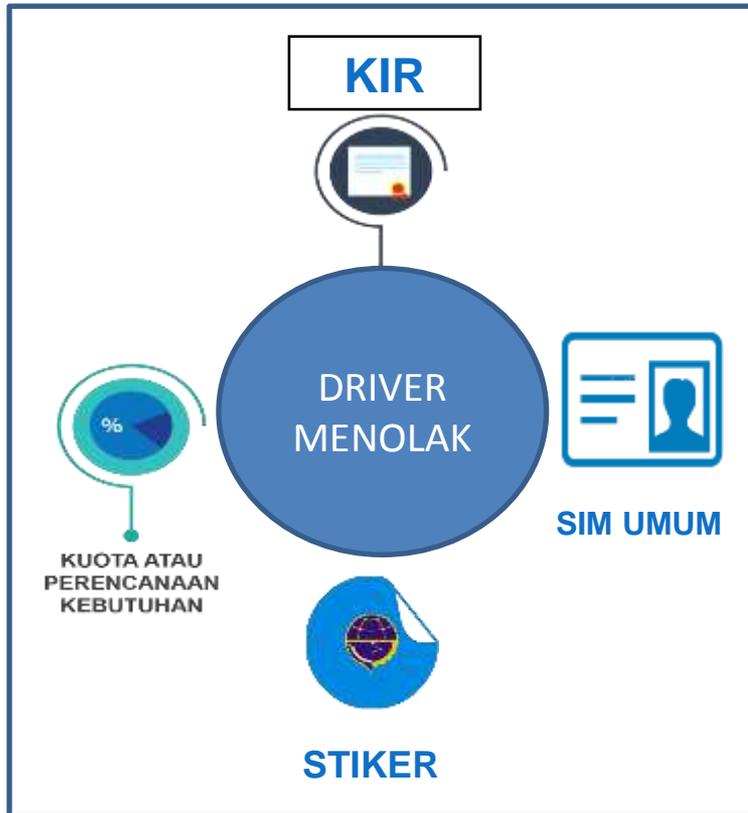


2. KUOTA ANGKUTAN SEWA KHUSUS

NO	WILAYAH/ PROVINSI	KUOTA (KEND)	KETERANGAN
1	JABODETABEK	36.510	
2	JAWA BARAT	15.418	
3	JAWA TENGAH	4.935	
4	JAWA TIMUR	4.445	
5	ACEH	748	
6	SUMATERA BARAT	400	
7	SUMATERA UTARA	3.500	
8	SUMATERA SELATAN	1.700	
9	LAMPUNG	8.000	
10	BALI	7.500	
11	SULAWESI UTARA	997	
12	SULAWESI SELATAN	7.000	
13	KALIMANTAN TIMUR	1.000	
14	YOGYAKARTA	400	
15	RIAU	400	
JUMLAH		91.953	



3. ISU PENTING



Telah dijelaskan Substansi
Pengaturan

Keluhan Driver Terhadap Aplikator

- Pelanggaran tarif batas bawah.
- Suspend akun sepihak
- Order diprioritaskan kepada driver tertentu/diskriminasi order
- Perusahaan Aplikasi tidak diatur pemerintah
- Tidak pernah ada sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan Aplikasi

Keluhan Masyarakat Terhadap Layanan

- Driver menggunakan akun orang lain
- Satu driver memiliki banyak akun
- Pelayanan driver kasar, kendaraan bau rokok, dan tidak terawat
- Tindakan kriminal oleh driver online



4. TINDAK LANJUT

PROGRAM AKSI KESELAMATAN PERHUBUNGAN DARAT (Kegiatan Pemberian Subsidi SIM A Umum & KIR Gratis)

NO.	WILAYAH / PROVINSI	PROGRAM AKSI
1.	JABODETABEK	Subsidi SIM A Umum (11 November 2017 dan 25 Februari 2018) KIR Gratis (8 Februari 2018 & 6 Maret 2018)
2.	Provinsi Jawa Timur	Subsidi SIM A Umum (27 Februari 2018) KIR Gratis (8 Maret 2018)
3.	Provinsi Jawa Barat	Subsidi SIM A Umum (3 Maret 2018)
4.	Provinsi D.I.Yogyakarta	Subsidi SIM A Umum (11 Maret 2018)

Teguran kepada Perusahaan Aplikasi :

- a. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor HK.202/1/19/DRJD/2017 tanggal 9 November 2017 Perihal Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017.
- b. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor HK.402/1/2/DRJD/2017 tanggal 5 Maret 2018 Perihal Surat Teguran untuk melaksanakan moratorium pendaftaran.



#PM104



Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan



kemenhub151 |

Email : info151@dephub.go.id |

dephub.go.id |



151

1 Perizinan Angkutan

2 Perintis dan Barang Lepas

3 Penyeberangan Jarak Jauh

4 Tarif Angkutan

5 Monitoring dan pengawasan oleh BPTD



Substansi

Implementasi

Perizinan Angkutan	<ul style="list-style-type: none">- Persyaratan load factor lintas dalam penambahan izin baru- Persyaratan memiliki persetujuan pendahuluan pengadaan kapal (izin baru)- Perizinan Online (SPIONAM)
Perintis dan Barang Lepas	<ul style="list-style-type: none">- Penerbitan Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : SK.218/AP.204/DRJD/2018 tentang Komponen Penghasilan dan Biaya Yang Diperhitungkan Dalam Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Perintis- Proses usulan Tarif Barang Lepas dari PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
Penyeberangan Jarak Jauh (LDF)	<ul style="list-style-type: none">- Subsidi operasional kapal pada lintas Surabaya-Lembar (KMP. Legundi) dan Jakarta-Surabaya (Ro-ro Cargo. Prayasti) oleh Ditjen Hubdat pada Tahun 2017 dan 2018 untuk mengurangi beban jalan
Tarif Angkutan Penyeberangan	<ul style="list-style-type: none">- Sedang dilakukan proses revisi KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan
Monitoring dan pengawasan oleh BPTD	<ul style="list-style-type: none">- Monitoring dan pengawasan pelaksanaan angkutan penyeberangan serta Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat- Perlu langkah tindak lanjut dari BPTD dalam pelaksanaan di lapangan



TERIMA KASIH

DIREKTORAT ANGKUTAN DAN MULTIMODA



kemenhub151 |

Email : info151@dephub.go.id |

dephub.go.id |



151